

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa diwarnai oleh kegiatan politik. Berbicara mengenai politik, Indonesia sebagai negara demokrasi tidak terlepas dari adanya partai politik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat (1) yaitu bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Partai politik sebagai salah satu lembaga yang berperan menyalurkan aspirasi masyarakat memiliki kepentingan dan tujuan tertentu dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan visi, misi dan cita-cita partainya. Partai politik sebagai agen penyalur aspirasi masyarakat berusaha untuk mendapatkan kedudukan di Parlemen. Partai politik akan mendapatkan kursi di Parlemen jika berhasil mengumpulkan suara dalam pemilihan umum. Mengumpulkan suara masyarakat dalam pemilihan umum memerlukan strategi yang tepat. Setiap 5 tahun pada periode pemilihan umum selalu muncul bakal calon legislatif baru. Bakal calon legislatif ini ada yang wajah baru dalam politik dan ada juga pemain lama yang sudah malang melintang dalam perpolitikan.

Bakal calon legislatif jika memenuhi persyaratan akan menjadi calon legislatif yang diusulkan oleh partai politik pengusungnya. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum, selama masa kampanye partai politik berlomba-lomba menarik simpati masyarakat dengan mempromosikan calon legislatif dari partainya supaya dilirik masyarakat untuk dipilih.

Masyarakat akan menilai para calon legislatif ini baik secara kehidupan pribadinya, kinerjanya dalam masyarakat maupun menyeluruh melihat partai politik yang mengusungnya. Untuk mendapatkan simpati masyarakat, partai politik harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang baik dan diinginkan masyarakat, bukan hanya sekedar keinginan partainya saja. Partai politik harus memiliki calon legislatif sebagai figur yang dicintai dan diinginkan oleh masyarakat untuk dijadikan legislatif. Mendapatkan figur partai yang dicintai masyarakat tentu ada prosedur tersendiri dan tidaklah didapat dengan cara instan melainkan melalui proses. Salah satunya melalui pendidikan politik.

Menurut Kartono (dalam Handoyo dan Puji Lestari, 2017) mengatakan, bahwa: pendidikan politik adalah pendidikan orang dewasa dan diberikan kepada generasi muda untuk diarahkan menjadi kader-kader politik yang akan berkompentensi memenangkan kegiatan politik. Pendidikan politik juga merupakan pendidikan terstruktur untuk setiap individu agar memiliki kepribadian politik, kesadaran politik, dan dapat berpartisipasi serta bertanggung jawab baik moral maupun etis demi tercapainya tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara .

Dalam menghadapi pemilihan umum masyarakat kadang memiliki perbedaan pilihan. Perbedaan pilihan ini seringkali memunculkan pertikaian

dikalangan masyarakat. Masyarakat harus dididik untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jangan karena perbedaan pilihan mengubah saudara menjadi musuh dan kawan menjadi lawan. Partai politik sebagai peserta pemilu yang mengusung kadernya menjadi calon legislatif juga harus mendidik masyarakat untuk saling rukun, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Partai politik hendaknya memberi contoh kepada masyarakat dengan berkampanye mencari dukungan melalui cara yang etis tanpa menjelekan calon legislatif dari partai politik saingan yang menjadi lawannya.

Pendidikan politik diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, pendidikan non formal melalui kursus, pelatihan, serta dalam pendidikan informal yaitu berupa didikan dalam keluarga, lingkungan sosial, pengajian, pentas seni budaya, lembaga swadaya masyarakat (LSM), partai politik, dll. ((Handoyo dan Puji Lestari, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa partai politik sebagai salah satu lembaga pendidikan politik, dimana ia memiliki tiga fungsi, yakni menyiapkan kader kepemimpinan nasional baik legislatif maupun eksekutif, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik pada internal partai dilaksanakan dalam bentuk kaderisasi. Terkadang proses kaderisasi ini tidak berjalan dengan maksimal, contohnya saja dalam mencalonkan legislatif ataupun kepala daerah, partai politik bukan mengambil kader terbaiknya, tetapi bisa saja mengambil kader dari partai lain.

Selain dilaksanakan dalam internal partainya, partai politik juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik melakukan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai strategi memilih calon legislatif dalam pemilu. Tetapi kenyataannya di lapangan banyak ditemukan partai politik yang mendidik masyarakatnya berpolitik dengan politik uang. Sering kita mendengar istilah “serangan fajar” menjelang hari-hari pemilihan umum. Serangan fajar dijalankan oleh para politisi nakal atau simpatisan partai dengan melakukan praktik membagi-bagikan uang kepada masyarakat supaya masyarakat memilih calon tertentu.

Pendidikan politik juga bisa memanfaatkan media sosial. Media sosial sebagai sarana pendidikan politik seharusnya tidak dijadikan tempat untuk menyebarkan hoaks ataupun ujaran kebencian terhadap calon legislatif tertentu. Terkadang partai politik yang seharusnya bertanggung jawab melakukan pendidikan politik ini, justru menjadi perusak moral dan etika politik dengan memunculkan kata-kata, kalimat, atau jargon-jargon propaganda, misalnya munculnya tanda pagar (tagar) tertentu yang menyinggung calon legislatif lainnya. Efeknya bukan pendidikan politik yang didapat melainkan memicu bibit-bibit perpecahan dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pendidikan politik menegaskan bahwa pentingnya pendidikan politik sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik dilakukan oleh partai politik supaya masyarakat sadar berpolitik dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Komunikasi politik yang baik seharusnya menciptakan pendidikan

politik dan demokrasi masyarakat yang sehat. Bukan dijadikan ajang saling sindir-menyindirnya para elit politik. Tindakan yang memecah belah masyarakat seperti ini membuktikan kegagalan pendidikan politik yang dilakukan partai politik.

Seyogianya, pendidikan politik dapat mendidik masyarakat untuk saling menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Partai politik mendidik masyarakat dengan cara yang etis dan beradab dalam menarik simpati masyarakat. Sehingga setelah pemilihan umum selesai, masyarakat akan legowo menerima kemenangan atau kekalahan dari calon legislatif yang didukungnya. Masyarakat bersatu menerima siapa yang menduduki parlemen dan mendukung pembangunan kemajuan bangsa dan negara dengan tidak menghujat calon legislatif ataupun pendukung yang tidak maju ke Parlemen.

Pada pemilihan umum legislatif Rabu, 17 April 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sempat diwarnai insiden kebakaran kotak suara di gudang logistik pemilihan umum Kecamatan Koto IX Tarusan dan menjadi sorotan nasional. Peristiwa kebakaran kotak suara itu terjadi pada saat proses perhitungan suara sedang berlangsung di ruangan lainnya. Walaupun ada insiden kebakaran tersebut pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan telah berakhir dengan sukses. Pada Rabu 14 Agustus 2019, telah dilantik sebanyak 45 orang legislatif (anggota DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2019-2024. Perolehan kursi terbanyak dari 13 partai peserta pemilihan legislatif 2019 di daerah tersebut, dikuasai oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra, Demokrat, Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Perolehan suara tertinggi diraih Partai Amanat

Nasional (PAN) sebanyak 26.655 suara (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, 2019).

Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai peraih suara terbanyak pada pemilihan umum legislatif (DPRD) tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada pemilihan umum legislatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 tercatat ada 44 orang calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Empat puluh empat orang DCT caleg dari Partai Amanat Nasional tersebut tersebar dalam 5 daerah pemilihan (dapil).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Partai Amanat Nasional berhasil menempatkan perwakilannya di setiap daerah pemilihan (dapil) untuk lanjut menuju legislatif. Keberhasilan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh kursi di Parlemen hingga menjadi peraih suara terbanyak pada periode pemilu tersebut tampaknya perlu kita kaji lebih lanjut tentang bentuk pendidikan politik seperti apa yang telah dilaksanakan partai ini. Untuk itu penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan masih mengalami permasalahan yang rumit.
2. Kendala-kendala pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Melihat beberapa kendala perlunya dilakukan tindakan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **C. Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah penelitian ini pada bentuk pelaksanaan pendidikan politik, kendala-kendala pelaksanaan pendidikan politik, dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemukan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa tindakan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Pesisir Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Pesisir.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Pemanfaatan teoritis
  - a. Bermanfaat dalam perkembangan ilmu/teori mengenai pendidikan politik.
  - b. Memberikan ide-ide dan dijadikan pedoman untuk penelitian sejenis.
2. Pemanfaatan Praktis
  - a. Untuk Penulis, untuk menambah wawasan dalam membuat sebuah karya tulis dan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi.
  - b. Untuk partai politik, dapat menjadi acuan partai politik demi meminimalisir kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik.
  - c. Untuk masyarakat, untuk menambah wawasan masyarakat mengenai pendidikan politik, yaitu memahami hak dan kewajibannya dalam politik.
  - d. Untuk pemerintah, memberikan masukan kepada pemerintah guna membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan politik di lingkungan masyarakat.